

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat disajikan beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Jumlah pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2022.
2. Realisasi biaya perlindungan sosial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2022.
3. Upah Minimum Kabupaten/Kota berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2022.
4. Jumlah pengangguran, realisasi biaya perlindungan sosial dan UMK secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2022.

5.2 Saran

Adapun saran yang diberikan sehubungan dengan hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah Provinsi Sumatera Utara diharapkan dapat meningkatkan investasi dan memberikan layanan edukasi bagi para pengangguran guna menghadapi tantangan globalisasi khususnya dibidang teknologi agar meningkatkan inteligensi bagi masyarakat, khususnya

untuk daerah daerah dengan jumlah penganggur terbanyak seperti Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, dll.

2. Untuk pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat meningkatkan alokasi dan realisasi pengeluaran pemerintah biaya perlindungan sosial. Pemerintah juga perlu memperhatikan masalah yang berkaitan dengan bidang pendidikan, sdm, dan kebutuhan gizi yakni demi meningkatkan sumber daya yang bermutu kedepannya.
3. Untuk pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat meningkatkan upah minimum agar tidak terjadi ketimpangan. Peningkatan upah minum tentu akan memberikan daya tarik jual-beli dan meningkatkan semangat kerja sehingga produktivitas juga ikut menaik. Ketika produktivitas disamaratakan pada tiap kabupaten dan kota tentu bisa menurunkan kemiskinan pada tiap kabupaten dan kota.
4. Untuk pemerintah Provinsi Sumatera sebaiknya dapat memberikan kebijakan khusus dan memperhatikan pada 3 kabupaten/kota yaitu Medan, Langkat dan Deli Serdang. Pemerintah hendaknya memperhatikan dan menyediakan lapangan pekerjaan, realisasi biaya perlindungan sosial yang efektif dan kenaikan upah yang sesuai standard dan kebutuhan hidup masyarakat.
5. Untuk peneliti selanjutnya, perlu melakukan kajian yang lebih mendalam dan rentang waktu penelitian untuk menganalisis bagaimana pengaruh jumlah pengangguran, realisasi biaya perlindungan sosial dan UMK

terhadap jumlah penduduk miskin dengan menambahkan variabel lain diluar penelitian ini.



THE
Character Building
UNIVERSITY